



djp

LAPORAN KINERJA



KPP PRATAMA BLORA

2024

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Blora Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora, sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Blora, 17 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Bambang Purwanta



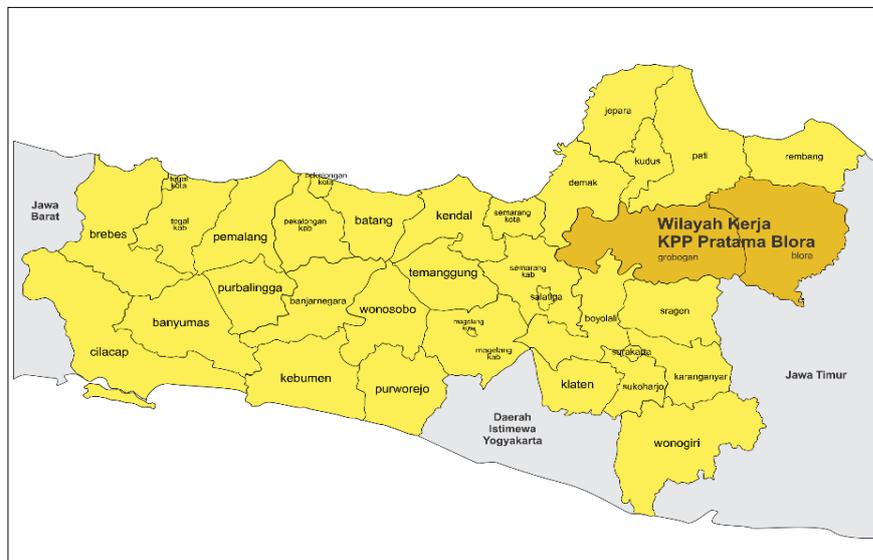
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. WILAYAH KERJA.....	4
B. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	10
A. VISI DAN MISI.....	10
B. SASARAN.....	11
C. KEBIJAKAN.....	11
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
B. CAPAIN NILAI KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR.....	18
C. UPAYA-UPAYA EXTRA EFFORT YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	18
D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	18
E. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	19
F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.....	19
G. ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO YANG TELAH DISUSUN DALAM PENCAPAIAN KINERJA.....	19
H. RENCANA AKSI KE DEPAN.....	19
I. REALISASI ANGGARAN.....	20
BAB 4 PENUTUP	21

A. WILAYAH KERJA

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora mulai beroperasi pada tanggal 6 Nopember 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kanwil DJP Jateng II Dan Kanwil DJP DIY serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I, Kanwil DJP Jateng II, dan Kanwil DJP DIY.

Wilayah kerja KPP Pratama Blora meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Terletak pada titik koordinat rupa bumi 11.00 15` BT – 11.10 34` BT dan 60.53` LS – 70.30` LS. Secara administrasi terbagi menjadi 35 Kecamatan dan 575 desa/kelurahan, dengan total luas wilayah sebesar 379.645,3 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 2.337.859 jiwa berdasarkan data sensus penduduk BPS Jawa Tengah tahun 2022.



Gambar Letak Geografis KPP Pratama Blora

Kabupaten Blora



Kabupaten Blora Terdiri dari 16 Kecamatan, antara lain :

- Kecamatan Banjarejo
- Kecamatan Blora
- Kecamatan Bogorejo
- Kecamatan Cepu
- Kecamatan Jajah
- Kecamatan Jati
- Kecamatan Jepon
- Kecamatan Jiken
- Kecamatan Kedungtuban
- Kecamatan Kradenan
- Kecamatan Kunduran
- Kecamatan Ngawen
- Kecamatan Randublatung
- Kecamatan Sambong
- Kecamatan Todanan
- Kecamatan Tunjungan

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan Terdiri dari 19

Kecamatan, antara lain :

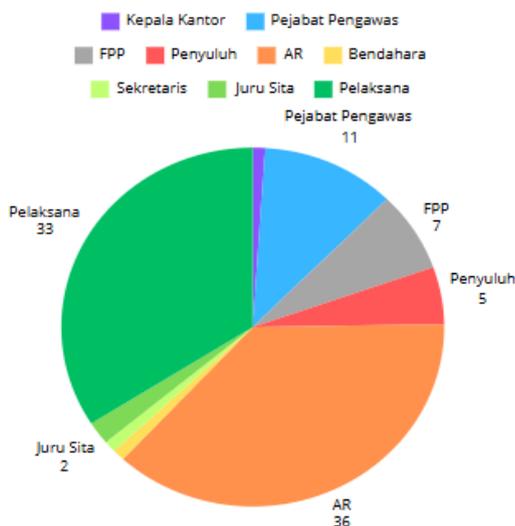
- Kecamatan Kedungjati
- Kecamatan Karangrayung
- Kecamatan Penawangan
- Kecamatan Toroh
- Kecamatan Geyer
- Kecamatan Pulokulon
- Kecamatan Kradenan
- Kecamatan Gabus
- Kecamatan Ngaringan
- Kecamatan Wirosari
- Kecamatan Tawangharjo
- Kecamatan Grobogan
- Kecamatan Purwodadi
- Kecamatan Brati
- Kecamatan Klambu
- Kecamatan Godong
- Kecamatan Gubug
- Kecamatan Tegowanu
- Kecamatan Tanggunharjo



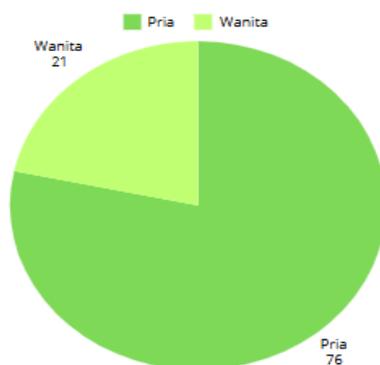
B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Blora dan KP2KP Purwodadi per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 97 pegawai.

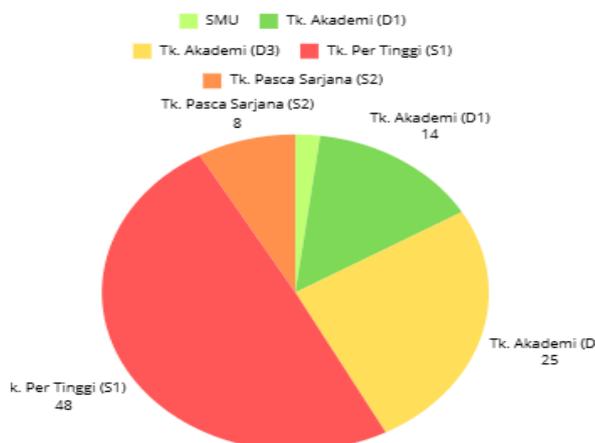
Distribusi pegawai berdasarkan Jabatan dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :



Distribusi pegawai berdasarkan Gender dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :



Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

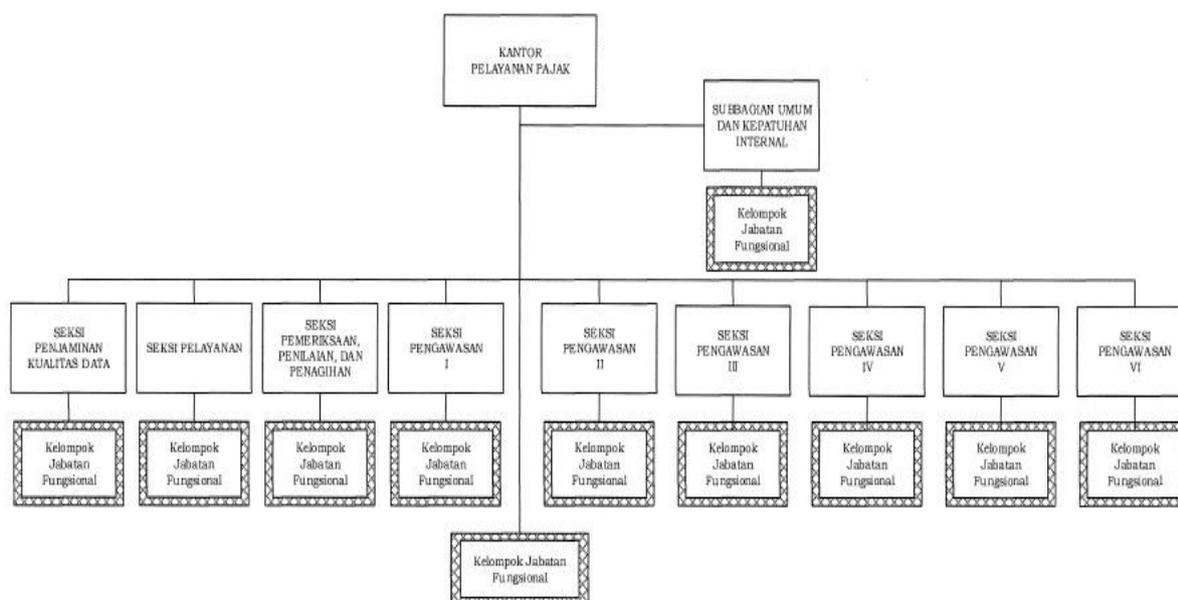
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 seluruh KPP Pratama termasuk KPP Pratama Blora memiliki tugas: melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur KPP Pratama Blora terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.



D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak - KPP Pratama Blora memiliki peran strategis untuk mengamankan penerimaan negara dalam APBN yang digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. KPP Pratama Blora juga memiliki tugas untuk menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan edukasi, pengawasan dan penegakan hukum secara sistematis, kontinu dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Blora dan Grobogan yang sadar dan tertib pajak.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat Kabupaten Blora dan Kab. Grobogan terhadap pentingnya peran pajak yang masih rendah;
2. KPP Pratama Blora adalah KPP dengan wilayah kerja terluas di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan luas total mencapai 3.818,45 km²
3. Kondisi sarana dan prasarana jalan yang sebagian mengalami kerusakan parah;
4. Daya beli masyarakat Kabupaten Blora dan Grobogan masih rendah sehingga menyebabkan perekonomian di Kabupaten Blora dan Grobogan juga rendah;

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak merumuskan Visi dan Misi yang harus dilaksanakan di Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sedangkan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora adalah “Menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan edukasi, pengawasan dan penegakan hukum secara sistematis, kontinu dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Blora dan Grobogan yang sadar dan tertib pajak.”

NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Blora menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kaidah-kaidah Perilaku Utama yang dipedomani dalam keseharian setiap pegawai yaitu:

Nilai-nilai	Perilaku Utama
Integritas <i>(Integrity)</i>	1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya
	2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal hal tercela

Profesionalisme (<i>Professionalism</i>)	3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.
	4. Bekerja dengan hati
Sinergi (<i>Synergy</i>)	5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati
	6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan (<i>Service</i>)	7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
	8. Bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan (<i>Excellence</i>)	9. Melakukan perbaikan terus menerus
	10. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

B. SASARAN

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan dan bukan cara pencapaiannya serta memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang spesifik pula.

Sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan pencapaiannya. Sasaran harus dijadikan standar keberhasilan dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Strategis 2024 adalah : "Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 762.576.601.000,-"

C. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora maka kebijakan yang digunakan adalah :

1. Merealisasikan target penerimaan pajak secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak;
3. Meningkatkan kepatuhan formal maupun material Wajib Pajak sehingga tercipta budaya sadar dan peduli pajak;
4. Menjadikan KPP Pratama Blora sebagai kantor pajak yang Mandiri, Bersih dan Berwibawa.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora Tahun 2024 ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,20%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,20
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,96	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,96
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,01
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,49
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	112,76%	Max	P/L	19,00%	42,22%	112,76
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,53
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,53%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,53
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,36
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,72%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,72
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,08%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,57
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,26%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,26
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,19%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,19
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,27%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,27
7	Penegakan hukum yang efektif							112,61
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,68%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,68
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	101,45%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	97,20%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,09
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,18
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,05	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,05
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	98,56	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,96
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,61	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	98,86	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,64

Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora Tahun 2024 adalah **109,64%**.

1. PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK YANG OPTIMAL

a) 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora tahun 2024 sebesar Rp 762.576.601.000 sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp 764.094.463.709. Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Blora tahun 2024 mencapai 100,20%. Indeks Capaian IKU sebesar 100,20%.

b) 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Target Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Blora terdiri atas Komponen realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan bobot 50% dan Komponen deviasi akurasi perencanaan kas dengan bobot 50%. Realisasinya mencapai 103,96%. Indeks Capaian IKU sebesar 103,96%.

2. KEPATUHAN TAHUN BERJALAN YANG TINGGI

a) 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa pada tahun 2024 adalah 100,17% yaitu sebesar Rp 703.138.656.539 dari target Rp 701.939.161.759. Indeks Capaian IKU sebesar 100,17%.

b) 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Target Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 adalah sebesar 60.077 WP dengan realisasi sebanyak 67.616 WP, atau sebesar 112,76%. Indeks Capaian IKU sebesar 112,76%.

3. KEPATUHAN TAHUN SEBELUMNYA YANG TINGGI

a) 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material pada tahun 2024 adalah 100,53% yaitu sebesar Rp 60.955.807.170 dari target Rp 60.637.439.241. Indeks Capaian IKU sebesar 100,53%.

4. EDUKASI DAN PELAYANAN YANG EFEKTIF

a) 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan edukasi pajak adalah setiap upaya dan proses pengembangan serta meningkatkan semua potensi warga Negara untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120%.

b) 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Tingkat Efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 diukur dari survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan di tahun 2024 sebesar 90,72% dari target 85,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 108,72%.

5. PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

a) 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut Penyandingan data (Data Matching). Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa di tahun 2024 sebesar 116,08% dari target 90,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

6. PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL YANG EFEKTIF

a) 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ke Wajib Pajak Stategis dan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dimulai dengan penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 119,26% dari target sebesar 100,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 119,26%.

b) 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Jumlah rata-rata capaian IKU/IKI pemanfaatan data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP sebesar 119,19% dari target 100%. Indeks Capaian IKU sebesar 119,19%.

c) 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan, Kualitas pelaksanaan kepatuhan dan penyiapan bahan baku pemeriksaan. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan tahun 2024 sebesar 114,27% dari target 100,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 114,27%.

7. PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

a) 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemeriksaan adalah persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu. Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan adalah 119,68% dari target 100,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 119,68%.

b) 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Efektivitas penagihan diukur melalui variable persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan. Efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 101,45% dari target 75,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

c) 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100,00% dari target 100,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 100,00%.

8. DATA DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS

a) 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan diukur melalui komponen laporan pengamatan dan penyediaan data. Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 sebesar 100,00% dari target 120,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

b) 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Variabel Penghimpunan data regional dari ILAP yaitu jumlah jenis data utama regional yang disampaikan dengan bobot 70% dan jenis data regional lainnya yang disampaikan dengan bobot 30% realisasinya sebesar 97,20% dari target sebesar 55,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

9. PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG ADAPTIF

a) 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Realisasi persentase pegawai yang memenuhi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM tahun 2024 sebesar 117,05% dari target 100,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 117,05%.

b) 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks Penilaian Integritas Unit diukur dengan tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survey kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Capaian IKU ini sebesar 98,56% dari target 85,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 115,95%.

c) 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Realisasi dari IKU ini di tahun 2024 adalah sebesar 98,61,00% dari target sebesar 90,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 109,57%.

10. PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

a) 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,86 % dari target yang ditetapkan sebesar 91,00%. Indeks Capaian IKU sebesar 120,00%.

B. CAPAIN NILAI KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA BLORA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

No	Capaian NKO				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	98,17%	105,86%	110,23%	105,59%	109,64%

C. UPAYA-UPAYA *EXTRA EFFORT* YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Melakukan analisis laporan keuangan, data internal dan eksternal;
2. Penerbitan SP2DK berkaitan analisa data tersebut;
3. Konseling terhadap wajib pajak yang telah dianalisis;
4. Melakukan Visit terhadap WP yang diduga melaporkan pajak tidak sebenarnya;
5. Mengusulkan pemeriksaan Khusus *all taxes* melalui DSPP dan melaksanakan pemeriksaan khusus *single tax*;
6. Peningkatan tindakan aktif penagihan;
7. Peningkatan penyelesaian pemeriksaan agar tepat waktu.

D. ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Perbandingan Realisasi Penerimaan dengan tahun sebelumnya

Target / Realisasi	2023	2024
Target	Rp 597.527.331.000	Rp 762.576.601.000
Realisasi	Rp 614.056.133.131	Rp 764.094.463.709
Capaian	102,77%	100,20%

Di tengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global, penerimaan pajak KPP Pratama Blora tumbuh 0,24% dari tahun sebelumnya. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, namun terdapat penurunan capaian dibanding dengan capaian tahun 2023. Kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor utama (kontributor terbesar).

Beberapa hal-hal yang telah dilakukan dan melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak yang sangat baik ini, antara lain:

1. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh KPP Pratama Blora yang efektif;
2. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Blora yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
3. Melaksanakan penyisiran WP berdasarkan wilayah;

4. Hibauan, sms blast, telpon dan WA terhadap WP yang tidak lapor dan tidak bayar;
5. Menyelesaikan DSP4 (Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak).

E. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran yang mencapai 120,00% dari target 91,00% menunjukkan KPP Pratama Blora efektif dalam penggunaan anggaran serta *output* yang dihasilkan optimal.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pengawasan pembayaran Wajib Pajak Sragetis dan WP Lainnya terhadap pembayaran yang naik turun dan yang pembayarannya tidak teratur, pendampingan terhadap bendahara pemerintah untuk pengamanan penerimaan dari sektor administrasi pemerintah, penerbitan STP terhadap terlambat lapor dan terlambat bayar, melaksanakan penyisiran WP berdasarkan wilayah, hibauan, sms *blast*, telepon dan *whatsapp* terhadap Wajib Pajak yang tidak lapor dan tidak bayar telah berhasil mendukung pencapaian target penerimaan KPP Pratama Blora.

G. ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO YANG TELAH DISUSUN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mitigasi risiko tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan target yang ada. Persentase pelaksanaan rencana aksi yang telah dijalankan sebesar 100% sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Formulir IV - Laporan Pemantauan Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024.

H. RENCANA AKSI KE DEPAN

1. Memastikan target WP yang belum lapor per AR untuk ditindak lanjuti;
2. Penerbitan Surat Teguran pada WP yang belum Melaporkan SPT Tahunan;
3. Menerbitkan SP2DK kepada WP yang ada data maupun tidak ada data dan belum melaporkan SPT Tahunan;
4. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terhadap wajib pajak yang memiliki potensi dan juga menggali potensi untuk melakukan pembayaran;
5. Memastikan pembayaran masa PPh Pasal 25 sesuai dan konsisten berdasarkan pajak terutang di SPT Tahunan sebelumnya;
6. Menerbitkan SP2DK kepada WP yang belum dan belum rutin melakukan pembayaran;
7. Melanjutkan Program SMS *Blast* dan menindak lanjuti WP yang tidak merespon dengan menelpon;

8. Menginventarisir terhadap WP yang sudah selesai dan setuju atas hasil pemeriksaan tapi belum melakukan pembayaran untuk dihimbau segera melakukan pembayaran;
9. Segera menghubungi WP terkait untuk pembayaran secara persuasif atas ketetapan yang belum lewat 30 hari dari tanggal terbitnya ketetapan;
10. Meningkatkan penagihan secara aktif bagi Wajib Pajak yang masih menunggak pajak dan belum daluarsa penagihannya.

I. REALISASI ANGGARAN

KPP Pratama Blora mendapatkan alokasi dan sumber pembiayaan dari APBN DIPA 015 sebesar Rp. 7.076.456.000 yang digunakan untuk menunjang kegiatan kantor. Rincian penyerapan anggaran tersebut, adalah:

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	648.219.000	646.792.965	99,78 %
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	346.314.000	344.533.527	99,49 %
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	624.811.000	624.538.916	99,96 %
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.570.108.000	4.556.800.212	99,90 %
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM	887.004.000	870.775.000	98,17 %
Jumlah		7.076.456.000	7.043.440.620	99,53%

Secara berkala, KPP Pratama Blora menyampaikan laporan penyerapan anggaran ke Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Penerimaan pajak tahun 2024 tercapai secara optimal. Realisasi penerimaan sebesar Rp 764.094.463.709 dengan target penerimaan yang dicapai sebesar Rp 762.576.601.000. Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Blora tahun 2024 mencapai 100.20%.

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Blora tahun 2024 mencapai 109,64%. Akan tetapi, masih ada satu IKU yang belum tercapai yaitu Persentase realiasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), KPP Pratama Blora kedepannya akan memperhatikan dan meningkatkan pencapaian IKU – IKU yang belum maksimal, agar Nilai Kinerja Organisasi di tahun mendatang menjadi semakin baik.

KPP Pratama Blora menghadapi berbagai tantangan untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang telah ditugaskan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I di Tahun Anggaran 2024. KPP Pratama Blora sudah berusaha untuk memaksimalkan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bantuan pihak ketiga guna tercapainya tujuan. Berbagai dukungan tersebut membantu KPP Pratama Blora untuk merealisasikan harapan masyarakat akan penerimaan pajak yang optimal yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kemandirian pembiayaan APBN.

KPP Pratama Blora masih memiliki banyak tantangan yang akan dihadapi di masa depan, salah satunya adalah mencapai target penerimaan tahun 2025. KPP Pratama Blora akan berusaha dan berjuang untuk mengamankan target penerimaan tahun 2025 seperti yang telah dilakukan sebelumnya di tahun 2024.